

## DAFTAR BACAAN

### A. LITERATUR

Adrian Sutedi, **Sertifikat Hak Atas Tanah**, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Sinar Gafika, Jakarta, 2012.

Ali Achmad Chomzah, **Hukum Pertanahan; Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya**, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, **Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia**, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012.

Nia Kurniati, **Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbtrase Dalam Teori Dan Praktik**, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Keenam, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.

-----, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon,dkk., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)**, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002,

Urip Santoso, **Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah**, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.

-----, **Hukum Agraria Kajian Komprehensif**, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.

-----, **Perolehan Hak Atas Tanah**, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2015.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

### C. WEBSITE

Kuliah Hukum, **Resume Hukum Administrasi Negara** diakses dari <http://www.kuliahhukum.com/resume-hukum-administrasi-negara/#> pada tanggal 28 Februari 2018

Hukum Online, **Masalah Pencabutan Keputusan TUN** diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a40d2104ce0/masalah-pencabutan-keputusan-tun> pada tanggal 28 Februari 2018

Academia Edu, **Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** diakses dari [https://www.academia.edu/9089821/AAUPB\\_Asas-Asas\\_Umum\\_Pemerintahan\\_yang\\_Baik](https://www.academia.edu/9089821/AAUPB_Asas-Asas_Umum_Pemerintahan_yang_Baik) pada tanggal 28 Februari 2018

Wikipedia, **Pengadilan Tata Usaha Negara** diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tata\\_Usha\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara) pada tanggal 8 Agustus 2018

Achmad Edi Subiyanto, "**Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945**", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/109546-ID-mendesain-kewenangan-kekuasaan-kehakiman.pdf> pada tanggal 14 Agustus 2018